

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pengendalian inflasi daerah merupakan instrumen vital dalam menjaga **stabilitas perekonomian dan melindungi daya beli masyarakat**, khususnya di Kabupaten Poso di mana **struktur konsumsi masih sangat didominasi oleh komoditas pangan**.

Pemantauan harga dilakukan secara intensif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan **ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga** di pasar-pasar utama. Memasuki Triwulan I Tahun 2026, tantangan pengendalian harga menjadi lebih kompleks seiring dengan adanya **peningkatan permintaan musiman** menjelang bulan Ramadan dan persiapan Idul Fitri yang jatuh pada bulan Maret.

Secara umum, kondisi harga bahan pokok di Kabupaten Poso sepanjang tiga bulan pertama tahun 2026 **menunjukkan tingkat resiliensi yang cukup baik** pada kelompok kebutuhan pokok strategis. Komoditas utama seperti beras terpantau sangat stabil dengan harga Beras Medium bertahan di angka Rp13.500/kg dan Beras Premium di Rp14.600/kg secara konsisten. Selain itu, terdapat capaian positif pada komoditas gula pasir curah yang justru mengalami tren penurunan harga dari Rp20.000/kg pada awal Januari menjadi Rp18.700/kg sejak pertengahan Februari. Stabilitas ini mencerminkan **keberhasilan koordinasi distribusi dan kecukupan stok cadangan pangan daerah**.

Namun demikian, dinamika signifikan terjadi pada **kelompok pangan bergejolak (volatile food)**, khususnya pada sektor **hortikultura dan protein hewani** menjelang akhir triwulan. Data pemantauan mingguan mencatat adanya **lonjakan tajam** pada harga cabai rawit merah yang menembus angka Rp80.000/kg pada akhir Maret, meningkat drastis dari stabilisasi harga di kisaran Rp50.000/kg pada bulan sebelumnya. Tren kenaikan juga terdeteksi pada daging ayam ras yang secara bertahap merangkak naik dari Rp30.700/kg menjadi Rp35.000/kg di penghujung periode ini.

Kondisi fluktuatif pada akhir Triwulan I ini memerlukan **kewaspadaan dan respons kebijakan yang presisi** dari Pemerintah Kabupaten Poso. Fokus pengendalian ke depan diarahkan pada penguatan langkah-langkah **intervensi** untuk meredam tekanan harga pada komoditas bumbu dapur dan daging ayam guna mengantisipasi puncak permintaan saat hari raya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Lonjakan harga dan volatilitas pada komoditas pangan bergejolak (*volatile food*), khususnya kelompok hortikultura dan protein hewani selama Triwulan I Tahun 2026, disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1. **Peningkatan Permintaan Musiman (Demand-Pull Inflation):** Memasuki pertengahan hingga akhir Maret, terjadi lonjakan permintaan masyarakat untuk kebutuhan bulan Ramadan dan persiapan Idul Fitri. Hal ini menjadi pendorong utama kenaikan harga pada komoditas **Cabai Rawit Merah, Bawang Merah, serta Daging dan Telur Ayam Ras**.
2. **Faktor Cuaca dan Kendala Produksi Lokal:** Curah hujan yang masih fluktuatif di awal tahun berdampak pada penurunan produktivitas lahan hortikultura lokal, yang

memicu keterbatasan pasokan di pasar.

3. **Ketergantungan Distribusi Eksternal:** Sebagian besar pasokan cabai dan bawang masih bergantung pada pengiriman dari luar daerah maupun sentra produksi lain di Sulawesi Tengah. Gangguan pada jalur logistik atau penurunan hasil panen di daerah pemasok langsung memberikan dampak instan pada level harga di Kabupaten Poso.
4. **Struktur Pasar dan Psikologi Pasar:** Adanya ekspektasi kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan sering kali memicu penyesuaian harga di tingkat pedagang sebelum puncak permintaan terjadi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Poso mengacu pada strategi nasional **4K**, yaitu:

1. **Keterjangkauan Harga**
2. **Ketersediaan Pasokan**
3. **Kelancaran Distribusi**
4. **Komunikasi Efektif**

Memasuki Triwulan I Tahun 2026, dinamika inflasi daerah Kabupaten Poso menunjukkan adanya tekanan musiman yang signifikan, Perkembangan harga komoditas pangan strategis pada periode ini cenderung bervariasi.

Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Poso melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan berbagai intervensi secara terpadu dan antisipatif. Intervensi difokuskan pada penguatan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok melalui monitoring rutin di Pasar Rakyat Sintuwu Maroso oleh perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pangan serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

Di sisi pasokan, TPID memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan kelancaran distribusi antarwilayah, mengingat ketergantungan pada daerah pemasok eksternal untuk komoditas hortikultura. Pemerintah daerah juga melakukan komunikasi kebijakan secara intensif untuk membangun persepsi publik bahwa pasokan pangan pokok (beras, gula, dan minyak) berada dalam kondisi aman. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan industri tetap terjaga guna mencegah praktik spekulasi harga di tingkat pedagang saat permintaan meningkat tajam di akhir Maret.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian inflasi Daerah

◦ **Penguatan Intervensi pada Komoditas Hortikultura dan Protein Hewani**

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pengendalian harga pada komoditas **cabai rawit merah dan bawang merah** yang mencatatkan volatilitas tertinggi di akhir triwulan. Mengingat tren kenaikan pada **Daging Ayam Ras** dan **Telur Ayam**, perlu dilakukan intervensi berupa Operasi Pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) yang lebih intensif menjelang puncak perayaan Idulfitri untuk meredam tekanan permintaan.

Optimalisasi Sistem Pemantauan Harga sebagai Instrumen *Early Warning*

Pemanfaatan data harga mingguan secara *real-time* perlu terus ditingkatkan untuk mendeteksi anomali harga lebih dini. Mengingat lonjakan harga cabai terjadi sangat cepat dalam tiga pekan terakhir Maret (Pekan 11-13), sistem peringatan dini ini krusial untuk memicu respons cepat TPID sebelum gejolak harga meluas ke komoditas lainnya di awal Triwulan II.

◦ Penguatan Kelancaran Distribusi dan Kelola Stok Pangan

Pemerintah daerah perlu memastikan kelancaran jalur distribusi dari daerah pemasok eksternal, terutama untuk kelompok hortikultura yang sangat bergantung pada pasokan luar wilayah. Optimalisasi fasilitas penyimpanan atau *cold storage* (jika tersedia) perlu dipertimbangkan untuk memperpanjang masa simpan komoditas yang mudah rusak (*perishable*) guna menjaga stabilitas stok saat terjadi gangguan cuaca atau logistik.

◦ Pemeliharaan Stabilitas Komoditas Penyangga Inflasi

Keberhasilan menjaga stabilitas harga **beras dan tren positif penurunan harga gula pasir curah** harus terus dipertahankan. Koordinasi berkala dengan Bulog dan distributor besar sangat diperlukan untuk memastikan cadangan beras dan minyak goreng tetap mencukupi sebagai bantalan utama terhadap inflasi daerah di tengah fluktuasi harga komoditas pangan lainnya.

◦ Penguatan Komunikasi Kebijakan dan Manajemen Ekspektasi

Memasuki periode puncak konsumsi Idulfitri, TPID perlu memperkuat komunikasi kebijakan kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi. Sosialisasi mengenai kecukupan stok pangan strategis (seperti beras dan minyak goreng) perlu dilakukan secara konsisten guna mencegah perilaku *panic buying* dan praktik spekulasi di tingkat pedagang yang dapat memperparah volatilitas harga di Pasar Rakyat Sintuwu Maroso.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

1. Penguatan Intervensi pada Komoditas Hortikultura dan Protein Hewani

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan intervensi pada komoditas dengan volatilitas tinggi, Langkah konkret:

- Melaksanakan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin dan terjadwal.
- Memberikan subsidi transportasi atau distribusi untuk menekan harga di tingkat konsumen.
-

Mendorong peningkatan produksi lokal melalui bantuan sarana produksi (benih, pakan, pupuk).

- Menjalin kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin pasokan.

2. Optimalisasi Sistem Pemantauan Harga sebagai Instrumen Early Warning

Penguatan sistem informasi harga menjadi kunci dalam mendeteksi potensi inflasi lebih dini.

Langkah konkret:

- Mengintegrasikan data harga dari pasar tradisional, distributor, dan ritel modern secara real-time.
- Memanfaatkan dashboard pemantauan harga berbasis digital sebagai alat analisis harian TPID.
- Menetapkan ambang batas (threshold) kenaikan harga sebagai trigger intervensi cepat.
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam analisis data inflasi.

3. Penguatan Kelancaran Distribusi dan Kelola Stok Pangan

Gangguan distribusi sering menjadi pemicu utama inflasi daerah.

Langkah konkret:

- Menjamin kelancaran transportasi logistik melalui koordinasi lintas sektor (perhubungan, kepolisian, dan distributor).
- Mengidentifikasi dan mengatasi bottleneck distribusi (akses jalan, biaya angkut tinggi).
- Mengoptimalkan peran gudang pangan dan cold storage.

4. Pemeliharaan Stabilitas Komoditas Penyangga Inflasi

Komoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, dan BBM perlu dijaga stabilitasnya.

Langkah konkret:

- Memastikan ketersediaan stok melalui koordinasi dengan BULOG dan distributor utama.
- Melakukan operasi pasar khusus pada saat terjadi lonjakan harga signifikan.
-

Mengendalikan distribusi agar tidak terjadi penimbunan atau spekulasi harga.

- Memperkuat pengawasan rantai pasok oleh Satgas Pangan.

5. Penguatan Komunikasi Kebijakan dan Manajemen Ekspektasi

Ekspektasi masyarakat sangat memengaruhi dinamika inflasi.

Langkah konkret:

- Menyampaikan informasi harga dan ketersediaan pangan secara transparan kepada masyarakat.
- Mengoptimalkan peran media massa dan media sosial sebagai sarana edukasi publik.
- Menyusun narasi komunikasi kebijakan yang konsisten antar OPD.